

DAMPAK PROGRAM FEMINISASI KEMISKINAN DI KABUPATEN LAMONGAN

Choirul Anam
UNIVERSITAS DARUL ULUM
Jl. Airlangga No. Sukodadi - Lamongan
Email : choirulanam@unisda.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pemberdayaan perempuan dalam pengentasan kemiskinan dan untuk mengetahui faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi program feminisasi kemiskinan. Dalam penelitian akan membahas tentang Penanganan pengentasan kemiskinan tentunya melalui konsep dan penanganan dengan melibatkan berbagai unsur yang terlibat didalamnya, termasuk pemberdayaan perempuan. Program – program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat selama ini merupakan upaya untuk mewujudkan terciptanya dan terdistribusinya manfaat pembangunan bagi laki – laki dan perempuan secara berimbang. Terlebih lagi bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) yang memiliki peran ganda akibat bercerai, suami sakit atau meninggal, atau ditelantarkan dan tidak dinafkahi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak program feminisasi kemiskinan terhadap tingkat kesejahteraan KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) sangat signifikan, dan dengan adanya program tersebut mampu meringankan beban para KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) miskin dan berdasarkan hasil Observasi, ditemukan juga bahwa sebenarnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi program feminisasi kemiskinan yaitu sebagai penyebab kemiskinan yang dialami oleh KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) miskin di Kabupaten Lamongan, yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi kemiskinan yang dialami. Bila diklasifikasikan berdasarkan faktor-faktor penyebab kemiskinan yang dialami oleh Kepala Rumah Tangga Perempuan miskin yaitu faktor ekonomi, sosial/budaya, structural serta SDM dan SDA.

Kata Kunci : Feminisasi Kemiskinan, KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan), dan Faktor yang mempengaruhi

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effectiveness of empowering women in poverty alleviation and to find out what factors influence the feminization program of poverty. In the study will discuss the handling of poverty alleviation of course through concepts and handling by involving various elements involved in it, including empowering women. The women's empowerment programs carried out by the government and the community have been an effort to realize the creation and distribution of development benefits for men and women in a balanced manner. Moreover, the Head of Female Household KRTP (Female Household Head) has a dual role due to divorced, husband sick or dead, or abandoned and not supported.

The method used in this study is descriptive research with a qualitative approach. Based on the results of the study, it was found that the impact of the feminization program on the welfare level of the female household head was very significant, and the existence of the program was able to alleviate the burden of poor female household heads and based on observations it was found that there were actually the factors that influence the feminization program of poverty are the causes of poverty experienced by the poor KRTP (female household head) in Lamongan, which directly or indirectly impacts the conditions of poverty experienced. If classified based on the factors that cause poverty experienced by the Head of Poor Women's Household, namely economic, social / cultural, structural and HR and SDA factors.

Keywords: Feminization of Poverty, KRTP (Female Household Head), and influencing factors

PENDAHULUAN

Kondisi kemiskinan itu tidak bisa terpisah dari suatu keberhasilan atau kegagalan dalam pembangunan. Keberhasilan suatu pembangunan itu mencerminkan sebuah keberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan, dan sebaliknya. Oleh sebab itu persoalan kemiskinan senantiasa menjadi isu yang sangat penting dalam pembangunan. Hal ini tidak hanya terkait dengan hajat hidup orang banyak dan kewajiban pemerintah untuk membebaskan warga negaranya dari kemiskinan, tetapi juga karena secara umum terbebas dari kemiskinan merupakan hak konstitusi warga negara dan hak asasi setiap manusia. Berbicara kemiskinan dalam kajian ini adalah berhubungan dengan KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) miskin di Kabupaten Lamongan, dimana tingkat kemiskinan ini juga dipicu dengan keberadaan KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) miskin. Kemiskinan adalah menggambarkan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kemiskinan juga mencerminkan suatu kegagalan seseorang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya agar dapat menjalani kehidupan secara bermartabat. Untuk itu, kebutuhan tidak hanya terkait dengan kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup kebutuhan sosial, politik, emosional, maupun spiritual. Oleh karena itu kemiskinan itu tidak berdimensi tunggal. Keberadaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yang saling terkait. Kemiskinan seseorang terkait dengan tingkat pendapatan, pendidikan, pengangguran, kesehatan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, lingkungan, dan gender. Faktor-faktor tersebut dipengaruhi dan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berupaya memenuhi kebutuhannya. Misalnya, karena tingkat pendidikannya yang rendah, maka akses seseorang untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang baik menjadi kecil. Keterbatasan akses tersebut menyebabkan ia berpeluang menjadi pengangguran dan karena itu peluangnya untuk hidup sejahtera semakin kecil. Berbagai faktor tersebut saling terkait dan membentuk lingkaran kemiskinan yang melingkupi kehidupan seseorang. Akibatnya, masyarakat miskin memiliki peluang terbatas untuk berusaha dalam upaya peningkatan pendapatannya karena berbagai faktor seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), akses permodalan, informasi, dan teknologi, serta kebijakan pemerintah yang belum menjangkaunya.

Berbicara permasalahan kemiskinan menjadi permasalahan global yang tidak hanya dihadapi oleh Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu dalam menangani permasalahan kemiskinan diperlukan pendekatan terpadu dan komprehensif dari beberapa sektor / dinas di Kabupaten Lamongan. Tidak hanya itu, pemerintah Kabupaten Lamongan juga perlu melakukan sinkronisasi dengan berbagai program pengentasan kemiskinan yang lain, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, apalagi yang berhubungan dengan KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) miskin.

Diketahui bahwa angka kemiskinan pada tahun 2011 Kabupaten Lamongan sebesar 17,41 persen, Provinsi Jawa Timur sebesar 13,85 persen dan Nasional sebesar 30,01 persen, pada tahun 2012 Kabupaten Lamongan sebesar 16,70 persen, Provinsi Jawa Timur sebesar 13,08 persen dan Nasional sebesar 11,66 persen, pada tahun 2013 Kabupaten Lamongan sebesar 16,18 persen, Provinsi Jawa Timur sebesar 12,73 persen dan Nasional sebesar 11,46 persen, tahun 2014 Kabupaten Lamongan sebesar 15,68 persen, Provinsi Jawa Timur sebesar 12,28 persen dan Nasional sebesar 10,96 persen, tahun 2015 Kabupaten Lamongan sebesar 15,38 persen, Provinsi Jawa Timur sebesar 12,28 persen dan Nasional sebesar 11,13 persen, Pada tahun 2016 Kabupaten Lamongan sebesar 14,89 persen, Provinsi Jawa Timur sebesar 11,85 persen dan Nasional sebesar 10,70 persen dan pada tahun 2017 Kabupaten Lamongan sebesar 14,42 persen, Provinsi Jawa Timur sebesar 11,77 persen dan Nasional sebesar 10,12 persen. Meskipun mengalami penurunan, angka tersebut masih di atas Provinsi Jawa Timur, sehingga permasalahan kemiskinan perlu mendapatkan perhatian. Program pengentasan kemiskinan pada saat ini sudah banyak dilakukan seperti feminisasi kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lamongan.

Penanganan pengentasan kemiskinan tentunya melalui konsep dan penanganan dengan melibatkan berbagai unsur yang terlibat didalamnya yaitu dengan melalui pemberdayaan perempuan. Program – program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat selama ini merupakan upaya untuk mewujudkan terciptanya dan terdistribusinya manfaat pembangunan bagi laki – laki dan perempuan secara berimbang.

Program tersebut tidak hanya sebagai upaya jangka pendek dalam memberikan bantuan kepada KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) tetapi lebih kepada pemberdayaan yang berkelanjutan dalam rangka mengantisipasi adanya perangkap kemiskinan (poverty trap) terhadap KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) di Provinsi Jawa Timur khususnya di Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian / kajian tentang “Dampak Program Feminisasi Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan”

Berdasarkan Uraian di atas rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Dampak Program Feminisasi Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan yang dilihat dari 2 hal sebagai yakni Bagaimana efektifitas pemberdayaan perempuan dalam pengentasan kemiskinan?, serta Faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi program feminisasi kemiskinan ?

Mekanisme Pelaksanaan Program Feminisasi Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan

Mekanisme tahapan pelaksanaan Program Feminisasi Kemiskinan tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur Tahun 2015. Setelah mencocokkan antara Pedoman Umum dengan hasil wawancara terkait mekanisme pelaksanaan Program Feminisasi Kemiskinan di Kabupaten Lamongan, peneliti menemukan bahwa terdapat 6 tahapan program yang terlaksana dengan baik yaitu:

1. **Sosialisasi dan Pra Rembug Warga.** Tahap sosialisasi program telah melibatkan seluruh KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) sasaran, pendamping desa, sekretariat desa, pendamping kabupaten, dan perwakilan DPMD Kabupaten Lamongan. Pemilihan pendamping desa juga dilakukan melalui pra rembug warga dengan kehadiran dan persetujuan dari KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) sasaran dan Sekretariat Desa.
2. **Rembug Warga dan Klarifikasi dan Identifikasi Usulan Kebutuhan KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan).** Tahapan rembug warga dan identifikasi usulan kebutuhan usaha telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan Pedoman Umum.

Pada tahapan ini, identifikasi usulan kebutuhan KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) dilakukan melalui rembug warga. Usulan tersebut didasarkan pada keinginan, kemampuan dan pekerjaan mereka. Dari 73 jumlah KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) sasaran, sebanyak 46 orang memilih usaha bidang perdagangan (asongan, peracangan, toko sembako) dan 27 orang memilih usaha bidang ternak (kambing, ayam, bebek) contoh Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

3. **Pengajuan pencairan dan bantuan keuangan khusus.** Pengajuan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) diawali dengan pengajuan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dan telah diketahui oleh Kepala DPMD Kabupaten Lamongan. Setelah surat dan data yang terkait dengan pengajuan diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, maka akan diterbitkan Surat Permohonan Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Tahapan selanjutnya adalah transfer dana ke rekening Pemerintah Desa. Di Desa Datinawong, transfer dana dilakukan ke rekening Bendahara Desa dengan diketahui oleh Pendamping Desa dan perwakilan POKMAS.
4. **Rembug kelompok masyarakat KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) dan pengadaan barang KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan).** Tahapan ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Umum. Pembentukan POKMAS telah dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan proses penyaluran bantuan kepada KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) sasaran. Dalam pembelanjaan barang kebutuhan dilakukan oleh Sekretariat Desa, Pendamping Desa, dan Ketua POKMAS sebagai perwakilan dari KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) sasaran. Hal ini dilakukan sebagai suatu bentuk transparansi dana yang dibelanjakan untuk kebutuhan usaha sasaran.
5. **Penyerahan barang bantuan kepada KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan).** Tahapan ini telah terlaksana dengan baik. Bantuan yang diberikan sesuai dengan keinginan dari para KRTP (Kepala

Rumah Tangga Perempuan) sasaran. Sayangnya, tidak terdapat batasan waktu sehingga realisasi bantuan cukup lama yaitu sekitar 6 hingga 7 bulan sejak rebug warga dan identifikasi usulan usaha KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) sasaran.

6. **Pertanggungjawaban.** Tahapan pertanggungjawaban program telah terlaksana sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Umum dan sesuai dengan hierarki struktural Program Jalin Matra PFK. Pendamping Desa bertanggungjawab pada Pendamping Kabupaten. Pendamping Kabupaten bertanggungjawab untuk melakukan verifikasi LPJ Program dan menyampaikan hasilnya kepada DMPD Kabupaten Lamongan. DPMD Kabupaten Lamongan selaku Sekretariat Kabupaten bertanggungjawab kepada DPMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

1. Dampak Ekonomi

Sebagaimana tercantum dalam tujuan program, dampak ekonomi yang diharapkan dari program ini adalah peningkatan pendapatan melalui kepemilikan usaha yang berkelanjutan sehingga menciptakan suatu ketahanan ekonomi. Dari kepemilikan usaha tersebut, diharapkan kepada KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) yang menjadi sasaran dapat meningkatkan pendapatannya sehingga memudahkan mereka dalam pemenuhan kebutuhan hidup dasar sehari-hari. Para KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) yang menjadi sasaran akan terbukti mampu memanfaatkan bantuan usaha, sehingga mereka memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, masih banyak dari KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) yang menjadi sasaran yang tidak mampu melanjutkan bantuan usaha yang diberikan. KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) yang menjadi sasaran yang mampu mengelola dan mengembangkan usahanya mengungkapkan bahwa mereka lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, beberapa bahkan dapat menggunakan hasil usahanya sebagai biaya pendidikan bagi anak atau cucu.

Sedangkan peneliti menyimpulkan bahwa program ini tidak menciptakan suatu kemandirian finansial. Hal ini terbukti dari masih banyaknya KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan)

sasaran yang melakukan pinjaman kepada orang lain, serta menggantungkan diri dari bantuan orang lain seperti anggota keluarga atau tetangga. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara dampak yang diharapkan dengan dampak nyata terhadap KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) sasaran.

2. Dampak Sosial

Sebagaimana tercantum dalam tujuan program, dampak sosial yang diharapkan dari program ini adalah peningkatan derajat atau status sosial, peningkatan kesejahteraan sosial, dan peningkatan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan negatif masyarakat desa tentang janda atau KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) mulai terpatalkan dengan adanya program. Perlahan namun pasti mereka dapat meningkatkan perekonomiannya sehingga dapat membuktikan diri bahwa meskipun tidak memiliki suami namun mereka juga berusaha untuk membebaskan diri dari kemiskinan. Selain itu, para KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) sasaran merasa lebih percaya diri dan berkecukupan dengan adanya program ini. Umumnya para KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) sasaran tidak menuntut untuk memiliki harta benda yang mewah, mereka sudah cukup puas jika bisa memenuhi kebutuhan hidup dasar.

Sebelum adanya program, para KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) sasaran cenderung pasif dalam kegiatan bermasyarakat di desa. Mereka jarang mengikuti kegiatan desa dengan berbagai alasan antara lain yaitu merasa tidak diajak dan merasa tidak pantas. Beberapa KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) sasaran mengeluhkan bahwa mereka tidak pernah diundang untuk mengikuti kegiatan desa seperti PKK, sedekah bumi, bersih desa, rapat warga, ataupun pelatihan. Beberapa lainnya merasa mereka tidak pantas untuk mengikuti kegiatan desa karena malu dengan umur dan status sosialnya yang miskin sehingga mereka merasa tidak layak. Dengan adanya program ini, terdapat perubahan yaitu peningkatan partisipasi KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) sasaran dalam kegiatan desa. Mereka mulai melibatkan diri dalam

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Program Feminisasi Kemiskinan

Berdasarkan hasil Observasi, ditemukan bahwa sebenarnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi program feminisasi kemiskinan yaitu sebagai penyebab kemiskinan yang dialami oleh KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) miskin di Kabupaten Lamongan, yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi kemiskinan yang dialami. Bila diklasifikasikan berdasarkan faktor-faktor penyebab kemiskinan yang dialami oleh Kepala Rumah Tangga Perempuan miskin, dapat dibagi menjadi faktor ekonomi, sosial/budaya, structural dan SDM dan SDA

No	Faktor Penyebab	Keterangan
1	Faktor ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidakpemilikan asset tanah berupa sawah - Minimnya modal usaha yang saat ini dijalankan, kegiatan ekonomi dilakukan dengan modal seadanya. - Tidak ada sarana usaha, KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) hanya mengandalkan modal tenaga dan jejaring social. - Tidak memiliki banyak pilihan kerja.
2	Factor social/budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Sikap “nerimo ing pandum” (puas dengan berapapun hasil yang didapat), kemiskinan dianggap sebagai Takdir - Menikah di bawah tangan (nikah social) - Kebiasaan perempuan berhenti bekerja bila telah berumah tangga dan memiliki anak - System barter atau hutang dalam kegiatan ekonomi, sehingga tidak usaha tidak berkembang. - Tinggal di lingkungan yang rata-rata kondisinya miskin

3	Faktor ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak mendapat akses penuh terhadap bantuan social yang diterima (adanya system bagi rata). - Tidak dilibatkan dalam kegiatan structural Desa seperti PKK dan posyandu.
4.	SDA	<ul style="list-style-type: none"> - Tinggal di daerah pertanian / perkebunan kering, dengan hasil utama berupa pertanian tebu dan jagung. - Sering mengalami kekeringan air bila musim kemarau
5	SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan rendah - Usia sudah tua

Kesimpulan

A. Efektifitas Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengentasan Kemiskinan

1. Mekanisme Pelaksanaan Program Feminisasi Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan

Mekanisme tahapan pelaksanaan Program Feminisasi Kemiskinan tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur Tahun 2015. Setelah mencocokkan antara Pedoman Umum dengan hasil wawancara terkait mekanisme pelaksanaan Program Feminisasi Kemiskinan di Kabupaten Lamongan, peneliti menemukan bahwa terdapat 6 tahapan program yang terlaksana dengan baik yaitu:

- a) Sosialisasi dan Pra Rembug Warga
- b) Rembug Warga dan Klarifikasi dan Identifikasi Usulan Kebutuhan KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan)
- c) Pengajuan pencairan dan bantuan keuangan khusus
- d) Rembug kelompok masyarakat KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) dan pengadaan barang KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan)
- e) Penyerahan barang bantuan kepada KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan)
- f) Pertanggungjawaban

2. Evaluasi Dampak Program Feminisasi Kemiskinan Terhadap KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) Di Kabupaten Lamongan.

Untuk mengevaluasi dampak dari program, dilakukan melalui identifikasi kesenjangan dampak yang diharapkan dengan dampak nyata yang timbul. Dampak yang diharapkan merupakan bentuk nyata dari tujuan program. Menurut Langbein, dampak dapat berupa dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Pada Program Jalin Matra PFK di Desa Datinawong, peneliti menemukan dampak dari program dan membaginya ke dalam dua kategori yaitu dampak ekonomi dan dampak sosial. Dampak ekonomi yaitu peningkatan penghasilan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk kemandirian finansial menjadi sebatas dampak yang diharapkan karena tidak tercapai. Selanjutnya dampak sosial dari program ini yaitu peningkatan derajat atau status sosial, peningkatan kesejahteraan sosial, dan peningkatan partisipasi kehidupan bermasyarakat.

a) Dampak Ekonomi

Sebagaimana tercantum dalam tujuan program, dampak ekonomi yang diharapkan dari program ini adalah peningkatan pendapatan melalui kepemilikan usaha yang berkelanjutan sehingga menciptakan suatu ketahanan ekonomi dengan cara memberikan bantuan kepada KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) miskin.

b) Dampak Sosial

Sebagaimana tercantum dalam tujuan program, dampak sosial yang diharapkan dari program ini adalah peningkatan derajat atau status sosial, peningkatan kesejahteraan sosial, dan peningkatan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan negatif masyarakat desa tentang janda atau KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) mulai terpatahkan dengan adanya program. Perlahan namun pasti mereka dapat meningkatkan perekonomiannya sehingga dapat membuktikan diri bahwa meskipun tidak memiliki suami namun mereka

juga berusaha untuk membebaskan diri dari kemiskinan. Selain itu, para KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) sasaran merasa lebih percaya diri dan berkecukupan dengan adanya program ini. Umumnya para KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) sasaran tidak menuntut untuk memiliki harta benda yang mewah, mereka sudah cukup puas jika bisa memenuhi kebutuhan hidup dasar.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa urusan – urusan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Lamongan terkait program feminisasi kemiskinan antara lain :

- 1) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- 3) Urusan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
- 4) Urusan Sosial

Urusan social menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Lamongan antara kemiskinan, gelandangan, anak terlantar, tuna susila serta bencana alam. Untuk menanggulangi dampak social PMKS, pemerintah Kabupaten Lamongan memfasilitasi antara lain panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi.

B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Program Feminisasi Kemiskinan

Berdasarkan hasil Observasi, ditemukan bahwa sebenarnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi program feminisasi kemiskinan yaitu sebagai penyebab kemiskinan yang dialami oleh KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) miskin di Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi kemiskinan yang dialami. Bila diklasifikasikan berdasarkan faktor-faktor penyebab kemiskinan yang dialami oleh Kepala Rumah Tangga Perempuan miskin, yaitu faktor ekonomi, sosial/ budaya, struktural serta SDM dan SDA.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan rekomendasi antara lain :

1. Dari Dinas PMD, BAPPEDA, Dinas PPPA dan Dinas Sosial mengharapkan pemerintah untuk membuat suatu kebijakan terkait memperbanyak kegiatan pelatihan keterampilan kepada KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) dan juga bantuan peralatan penunjang, dan Program bagi perempuan lanjut usia serta program dibuat tidak tumpang tindih dengan OPD lainnya yang ada di Kabupaten Lamongan, sehingga program untuk feminisasi kemiskinan ini dapat terlaksana secara maksimal.
2. Jalin Matra PFK, KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) miskin tidak hanya butuh bantuan berupa bantuan usaha, melainkan juga perhatian dan bimbingan, oleh karena itu pelibatan Kader PKK tingkat desa atau Pendamping Desa menjadi sangat penting dan berguna sehingga perlu dioptimalkan perannya dalam melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program sekaligus perkembangan usaha KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) sasaran. Pelaksanaan tiap tahapan harus berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Umum, terlebih lagi tahapan Bimbingan Teknis serta Pengelolaan dan Pelestarian Program. Bimbingan teknis sangat perlu dilaksanakan secara menyeluruh agar para KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) sasaran mendapatkan pendampingan yang meliputi penyuluhan, konsultasi, asistensi, dan fasilitasi teknis. Bimbingan teknis dalam bentuk pelatihan dan pembinaan usaha, peningkatan SDM, pemasaran, dan lain-lain. Melalui proses pendampingan yang intens, maka potensi keberlanjutan usaha para KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) sasaran dapat ditingkatkan. Peran para Pendamping sangat penting dalam hal ini, untuk itu pemilihannya perlu memperhatikan tingkat kompetensi dan keterampilan sehingga mampu menyalurkan pengetahuannya kepada KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) sasaran.
3. Terkait Evaluasi Dampak Program Jalin Matra PFK di Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan potensi ekonomi KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan), tetapi juga harkat dan martabat, motivasi, rasa percaya diri dan harga diri mereka, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat dengan tetap memberikan penghormatan pada KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) sasaran untuk memberikan kewenangan terhadap jenis usulan usaha yang mereka inginkan. Memberdayakan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya dengan berdasarkan nilai efektifitas dan efisiensi saja, melainkan perlu juga dipertimbangkan hal-hal mendasar seperti perasaan dan kehidupan sosial. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan yang lebih adaptif seperti pendampingan yang intens, pemberian motivasi untuk berusaha, pemberian saran dalam kendala yang dialami KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan), serta peningkatan SDM agar usaha yang dimiliki KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) senantiasa berkembang dan produktif.
4. Kebijakan penanggulangan kemiskinan, khususnya terhadap Kepala Rumah Tangga Perempuan KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) miskin diharapkan dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Rumah tangga miskin dengan kepala keluarga perempuan, pada dasarnya kebutuhan utamanya adalah pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, dan papan), sehingga diharapkan fokus utama dalam program jaminan sosial yang dilakukan oleh pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar ini bisa dilakukan oleh instansi yang terkait yang berkepentingan. Selanjutnya apabila kebutuhan dasarnya telah terjamin oleh pemerintah, dalam rangka meningkatkan keberdayaan serta mendorong untuk bisa berkembang dapat didukung dengan peningkatan SDM (pendidikan dan kesehatan), kemudahan akses dalam menggapai sumberdaya ekonomi, atau bisa langsung dengan pemberian stimulan berupa peningkatan modal usaha.
5. Strategi pengentasan kemiskinan, khususnya bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan diharapkan sesuai dengan kondisi lokal dan faktor penyebab kemiskinan yang dialami oleh rumah tangga sasaran, dengan turut mengajak bicara langsung pelaku kemiskinan (partisipatoris) dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan sesuai kebutuhan dan harapan mereka. Mereka diharapkan diposisikan sebagai pelaku (subyek) program, bukan sebagai sasaran (obyek) program. Dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, selain dapat mengembangkan potensi ekonomi KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) miskin, juga dapat meningkatkan harkat dan martabat, motivasi, rasa percaya diri dan harga diri mereka, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2014. "Penelitian Tindakan Kelas". Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Achmadi dan Narbuko (2004). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badan Pusat Statistik. (2007—2017). *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)*. Diakses pada 28 September 2018, dari <https://lamongankab.bps.go.id/news.html>.
- Cahyono, Budhi dan Suharto, 2005, *pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Di Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah*, jurnal, JRBI Vol. 1, Yogyakarta.
- Chant, Sylvia & McIlwaine, Cathy. 2009. *Geographies of development in the 21st Century*. Northampton: MPG Books Ltd.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R, 2005, *Understanding Public Policy, Eleventh Edition*, New Jersey: Pearson Prentice Hall
- International Labour Organization. (2004). *Bunga-bunga di atas Padas: Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia*. ILO, Jakarta.
- Jaggar, Alison, 2013, *Feminist Politics and Human Nature*, Rowman & Allanheld publisher, Sussex.
- Levitan, Sar A., 1980, *Programs in Aid of the Poor for the 1980's, Policy Studies in Employment and Welfare, Fouth Edition*, The Johns Hopkinds University Press, Baltimore and London.
- Moenir, H.A.S., 2001, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhadjir, Noeng. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi IV*. Rake Sarasin, Yogyakarta
- Nurcholis, Hanif. 2009. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah (Pedoman Pengembangan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pemerintah Daerah)*. Grasindo: Jakarta.
- Owen, John M. 2006. *Program Evaluation: Forms and Approaches* Australia: The Guilford Press.
- Sobrin Jon, S.J. dan Pico Hernandez Juan, S.J. (1989), *Teknologi Solidaritas*, Kanisius, Yogyakarta.
- Subarsono, A. G. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: CV Alfabeta
- Sutrisno. 2001. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta : EKONISIA.
- Suryawati Chriswardani, 2005, "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional", *Jurnal Manajemen Pembangunan dan Kebijakan, Volume 08, No. 03, Edisi September (121-129)*.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga. Jakarta.